



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU**





LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja TW I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj TW I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggung jawaban dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj TW I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju Tahun 2026 adalah Rencana Kegiatan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju (Renstra Stasiun PPMHKP Mamuju) Tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2026 beserta Realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju di masa mendatang.

Mamuju, 08 April 2026
Plt. Kepala SPPMKHP Mamuju,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Dusil Hafid, S.St.Pi., M.Si



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF



Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun PPMHKP Mamuju pada Tahun 2026 adalah sebesar 103.80%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun PPMHKP Mamuju yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2026 Stasiun PPMHKP Mamuju telah ditetapkan target indikator kinerja sebanyak 11 IKU dan ada beberapa IKU yang sudah Terealisasi di TW I dan ada juga beberapa IKU yang belum Terealisasi karena baru akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya :

1. Persentase Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%) dengan target 72 terealisasi capaian 65.20 dan atau realisasi capaian dalam persen sebesar 90.56 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%) dengan target 72 terealisasi capaian 69.45 % dan atau realisasi dalam persen sebesar 96.46 %
3. Lokasi Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%) dengan Target 71 tidak ada Target triwulan I
4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks) dengan target 85.2 tidak ada taget triwulan I
5. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) dengan target 77 tidak ada taget triwulan
6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) dengan target 86 tidak ada taget triwulan
7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen) dengan target 86,2 dan terealisasi 100 Persen
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

Mamuju (Nilai) 92,1 tidak masuk dalam target triwulan I

9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai) dengan target 71.75
10. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%) dengan target 77 dan terealisasi bulan ini 100 persen
11. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks) dengan target 3.50 Realisasi triwulan I sebesar 3.71 atau Capaian dalam persen sebesar 106 persen.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 SDM Stasiun PPMHKP Mamuju	7
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Kegiatan 2026–2029	11
2.2 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran	14
2.3 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	15
2.4 Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Analisa dan Evaluasi	21
BAB IV PENUTUP	72
Lampiran - Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Sasaran Kegiatan SPPMKHP Mamuju	13
Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2026	15
Tabel 3. Alokasi Pagu TA 2026	18
Tabel 4. Sasaran Kegiatan1 (SK1).	20
Tabel 5. Sasaran Kegiatan 2 (SK2).	24
Tabel 6. Sasaran Kegiatan 3 (SK3).	26



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Mamuju	7



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Asas penyelenggaraan good governance adalah Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Mamuju merupakan perpanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PPMHKP Mamuju dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun PPMHKP Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Mamuju. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun PPMHKP Mamuju mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PPMHKP Mamuju menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

manajemen mutu lembaga inspeksi;

- g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, untuk Laporan Kinerja TW I Tahun 2026.

Stasiun PPMHKP Mamuju dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan unsur pelaksana pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan di daerah dengan susunan organisasi terdiri atas:

- a. Tim Kerja Dukungan Manajemen;
- b. Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- c. Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen;
- d. Tim Kerja Manajemen Mutu
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tim Kerja Dukungan Manajemen mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Tim Kerja Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penanganan



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

ikan, pembudidayaan, pembenihan, pembuatan pakan, pembuatan obat serta distribusi obat ikan,. Selain itu, juga melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi dan ketertelusuran mutu dan keamanan hasil lingkup Unit Pelaksana Teknis;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Produksi Primer di UPT.

Tim Kerja Mutu Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Selain itu juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program kegiatan dan agenda pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan di UPT; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Tim Kerja Mutu Pascapanen di UPT.

Tim Kerja Penerapan Manajemen Mutu mempunyai tugas

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

melaksanakan kegiatan penerapan Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Unit Pelaksana Teknis. Selain itu juga menyelenggarakan Fungsi antara lain :

- Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian lingkup UPT di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pengelolaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan lingkup UPT;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Mamuju selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut :





LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

1.3 Sumber Daya Manusia Stasiun PPMHKP Mamuju

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju dibantu oleh 4 (Empat) Tim kerja yaitu Tim Kerja Mutu Produksi primer, Tim Kerja Mutu Pasca Panen, Tim Kerja Penerapan Manajemen Mutu, dan Tim Kerja Dukungan Manajemen serta kelompok Jabatan Fungsional, diantaranya Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Verifikator Keuangan, Penata Keuangan APBN, APK APBN dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Stasiun Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Mamuju saat ini berjumlah 10 orang PNS dengan dibantu 5 orang PPPK dan 6 orang pegawai PJLP.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja TW I Tahun 2026 ini menyampaikan tingkat pencapaian kinerja Stasiun PPMHKP Mamuju pada tahun 2026. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Tahun 2026 tersebut diketahui dengan cara membandingkan target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi kinerja TW I Tahun 2026.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja TW I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Mamuju mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- BAB I. **Pendahuluan**, menjelaskan umum, dengan penekanan kepada aspek Kegiatan serta permasalahan utama (*strategicissued*) yang sedang dihadapi
- BAB II. **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III. **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

BAB IV. **Penutup**, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kegiatan 2025–2029

Perencanaan Kegiatan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang disusun dengan cara mengintegrasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan sumber daya lain agar mampu mewujudkan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja merupakan tolok ukur penting dari sistem kinerja instansi pemerintah.

Stasiun PPMHKP Mamuju telah menyusun perencanaan Kegiatannya dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Mamuju tahun 2025 -2029 serta sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Trwuwulan I Tahun 2026.

Selaras dengan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Mamuju memiliki fungsi Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan, Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan lembaga inspeksi, Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional laboratorium dan lembaga inspeksi, pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kontribusi Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam bentuk sistem jaminan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan meningkatkan produktivitas serta dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan pola konsumsi global serta nasional yang



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh UPT BPPMHKP.

Berdasarkan perubahan global dan agar mampu menjawab tantangan dan mengemban fungsi tersebut, maka Stasiun PPMHKP Mamuju yang diposisikan sebagai subsistem dari sistem perdagangan dan sebagai subsistem dari sistem pencegahan/perindungan (proteksi) kesehatan ikan dan sumber daya perairan yang bermutu, aman dikonsumsi, maka harus memiliki visi yang mampu menggerakkan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan program peningkatan produksi kelautan dan perikanan yang lestari serta sebagai penggerak dalam peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan.

Dalam peningkatan mutu produk dan produktivitas usaha perikanan serta daya saing maka perlu sentuhan teknologi di bidang usaha penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan sehingga terjadi efisiensi. Hal tersebut merupakan basis industrialisasi di bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan global dan selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka visi dan misi BPPMHKP sebagai berikut:

Visi : “Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing”. Penjelasan **Hasil perikanan**, mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya dimaksud ikan, yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan; **Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman**, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (bermutu) dan



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026



tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (aman konsumsi); **Terpercaya** mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (*HC* dan *HACCP*) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan international.

Misi : 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan. 2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.

Adapun Tujuan Kegiatan Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan dalam mendukung Pengawasan, Pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah menjamin mutu hasil perikanan nasional”

2.1 Sasaran dan Rencana Kerja Anggaran

Sasaran Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan mendukung Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yaitu:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Mamuju

SK	SASARAN KEGIATAN
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Pengawasan Mutu hasil kelautan perikanan
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten sesuai standar
SK3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akuntabel di Lingkungan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka kebijakan yang ditetapkan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta manajemen pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

2. Peningkatan dan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan penerapan SNI dalam operasional laboratorium uji dan lembaga inspeksi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional.
4. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu-hilir.
5. Pengembangan akuntabilitas kinerja dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan kebijakan di atas yang merupakan landasan dalam penyusunan rencana kerja atau program. Program Stasiun PPMHKP Mamuju tidak terlepas dari program BPPMHKP yaitu program Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang dijabarkan dalam kegiatan yaitu Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPPMHKP lainnya.

Kegiatan yang telah disusun tersebut merupakan aktualisasi operasional dari suatu rencana Kegiatan yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi dan berlaku untuk periode satu tahun. Stasiun PPMHKP Mamuju pada tahun 2026 mengelompokkan kegiatan menjadi 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan diantaranya :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Ikan dengan kegiatan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Manajemen Mutu
2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

2.2 Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Salah satu dari 9 (sembilan) program nasional Reformasi Birokrasi adalah

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

Penguatan Kinerja. Penerapan penguatan kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Penguatan Kinerja Instansi Pemerintah berupa peningkatan kualitas Laporan Kinerja dan kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan Indikator Kinerja pada Kementerian yang mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka pada bulan Januari 2026 Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju sebagai pihak pertama dan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan sebagai pihak kedua telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 (Lampiran 2). Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab pihak pertama. Sementara itu untuk pihak kedua akan memberikan supervisi dan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Adapun Target dan realisasi kinerja tahun 2026 dapat di lihat pada Tabel 2 berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	72

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Mamuju	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	3.5

2.2 Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Mamuju pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp.3.483.665.000. Adapun alokasi anggaran berdasarkan kegiatan disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Alokasi Pagu Stasiun PPMHKP Mamuju TA.2026

No.	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	95.775.000	44.717.000
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten	80.000.000	80.000.000



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

	Sesuai Standar		
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	3.307.890.000	3.033.612.000

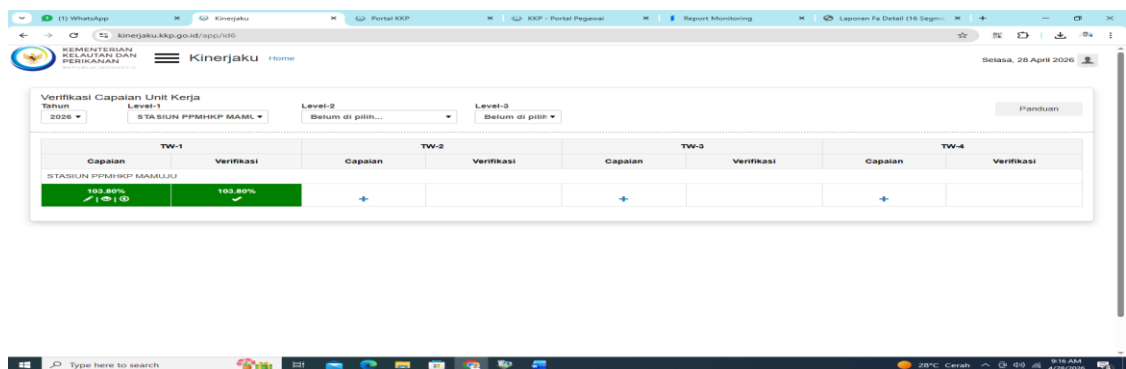
BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun PPMHKP Mamuju sebesar 103,80% (kategori Baik). Nilai pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program Badan pengendalian dan Pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Stasiun PPMHKP Mamuju pada triwulan I Tahun 2026 untuk setiap Sasaran Kegiatan dalam dashboard system aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap Sasaran Kegiatan. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun PPMHKP Mamuju Tahun 2026 disajikan pada Tabel Berikut:



TW-1		TW-2		TW-3		TW-4	
Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi	Capaian	Verifikasi
103.80%	✓						

3.2 Analisis dan Evaluasi

SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja dari Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 4. SK1. Target dan realisasi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I TAHUN 2026	Realisasi TW I 2026
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan hasil kelautan dan perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	72	65.20
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	72	65.45
		3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen)	86	100
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)	77	77
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)	3.5	3.71

IK.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap

meliputi CPIB dikapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku
- Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

1. Capaian

Indikator Kinerja jumlah sertifikat sektor mutu produksi primer yang diterbitkan SPPMKHP Mamuju diukur dengan menghitung jumlah Realisasi sertifikat yang diterbitkan sektor mutu produksi primer pada triwulan I tahun berjalan. Pada periode

triwulan I Tahun 2026, capaian Sertifikat belum terdapat realisasi sehingga capaian persentase sertifikasi sektor mutu produksi primer sebesar 0%. Realisasi penerbitan sertifikat sektor mutu produksi primer seperti disajikan dalam tabel 5 di bawah ini :

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2026			Renstra Tahun 2020-2026		
Realisasi	Target 2026	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Target 2026	% Capaian thd Target Restra
70	72	65.20	90.56	70	72	0

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Jumlah sertifikat sektor mutu produksi primer yang diterbitkan yaitu:

- Inspeksi ke Supplier untuk penerbitan Sertifikat sektor mutu produksi primer
- Surveilans untuk verifikasi penerapan terhadap sertifikasi yang sudah diterbitkan

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKU ini adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada pelaku usaha dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan selaku pembina pelaku usaha di daerah karena dengan tersertifikasinya pelaku usaha akan menjamin mutu dan ketertelusuran terhadap bahan baku yang nantinya akan masuk ke UPI.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKU ini antara lain belum tersosialisasikannya manfaat, mekanisme dan prosedur sertifikasi sektor mutu produksi primer, terbatasnya Pelaku usaha di Wilayah Kerja Stasiun PPMHKP Mamuju, kurang minatnya pembudidaya dan pemilik kapal untuk disertifikasi, karena salah satu persyaratan sertifikasi harus memiliki NIB yang dipandang memberatkan bagi mereka, - Pengajuan permohonan sertifikasi pada produksi primer belum ada pada triwulan 1 juga disebabkan rendahnya pemahaman para pembudidaya terkait sertifikasi dan kenyataan di lapangan para pelaku usaha ini belum membutuhkannya

IK.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah

$$\%X = (A+B)/xn \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

1. Capaian

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisika. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Pada Tahun 2026, telah dilakukan Surveilans sebanyak 2 ruang lingkup sertifikasi PMMT/HACCP dari 2 target yang telah ditetapkan sebanyak ruang lingkup produk.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK.02.1 pada Trwulan I Tahun 2026

No	UPT	Target	TE HACCP	TE SKP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	66,68%	66,68%	75,00%	69,45%

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

- UPT Stasiun PPMHKP Mamuju Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026 untuk kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pascapanen untuk target Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan belum menerbitkan sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dikarenakan sampai akhir triwulan ini belum ada

permohonan penerbitan Sertifikat SKP dari pelaku usaha yang telah memperoleh Rekomendasi/Pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

- UPT Stasiun pada Triwulan I tahun 2026 belum menerbitkan sertifikat Program manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) hal ini disebabkan karena tidak adanya permohonan baru terhadap penebitan sertifikat.
- UPT Stasiun pada Triwulan I tahun 2026 belum menerbitkan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan karena tidak adanya permohonan baru terhadap penebitan sertifikat dari Pelaku Usaha Perikanan.
- Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan dari sektor produksi pasca panen yakni pelaksanaan Surveilans HACCP dan pengambilan sampel dalam rangka Official Control di Unit pengolahan sebanyak 1 kali (4 Ruang lingkup) dengan metode Inspeksi onsite pada UPI CV. Sakura Prima pada tanggal 27 Maret 2026 yang saat ini Prosesnya sudah sampai pada tahap Tindakan Perbaikan oleh UPI.
- Belum menerbitkan sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dikarenakan sampai akhir triwulan ini belum ada permohonan penerbitan Sertifikat SKP dari pelaku usaha yang telah memperoleh Rekomendasi/Pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Belum menerbitkan sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dikarenakan sampai akhir triwulan ini belum ada permohonan penerbitan Sertifikat SKP dari pelaku usaha yang telah memperoleh Rekomendasi/Pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Pada Triwulan I tahun 2026 belum menerbitkan sertifikat Program manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) hal ini disebabkan karena tidak adanya permohonan baru terhadap penebitan sertifikat.
- UPT Stasiun pada Triwulan I tahun 2026 belum menerbitkan sertifikat Penerapan Distribusi Ikan karena tidak adanya permohonan baru terhadap penebitan sertifikat dari Pelaku Usaha Perikanan

- Masih rendahnya pemahaman dan minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi terhadap usahanya.

SK.3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 6. SK1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA	TARGET TAHUN 2026	Realisasi TW I 2026
SK 2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks)		82,5	
	Nilai Pembangunan Integritas lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)		77	
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)		86,2	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Persen)		86	100
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)		92,1	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)		71,75	
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)		77	77
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (Nilai)		3.35	3.71

IK. 7 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)

1. Capaian

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju Terealisasi 100% dari target 86%. Pencapaian ini dilihat dari indikator laporan hasil audit kinerja Stasiun PPMHKP Mamuju untuk TW I



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

Tahun 2026 sudah tuntas dilakukan. Pengawasan terkait Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup BPPMHKP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tersistem dengan Aplikasi SIDAK KKP sebagai kontrol tindak lanjut hasil temuan atau pengawasan.

Persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada 1 Januari 2026 s.d Maret 2026 atau Tahun 2023 s.d Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP . Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

Keterangan:

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Yang telah di tindak lanjuti SPPMKHP Mamuju

$\sum N$: Jumlah rekomen dari Laporan Hasil Pengawasan yang di berikan kepada SPPMKHP Mamuju

Tabel 2.20. Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2026

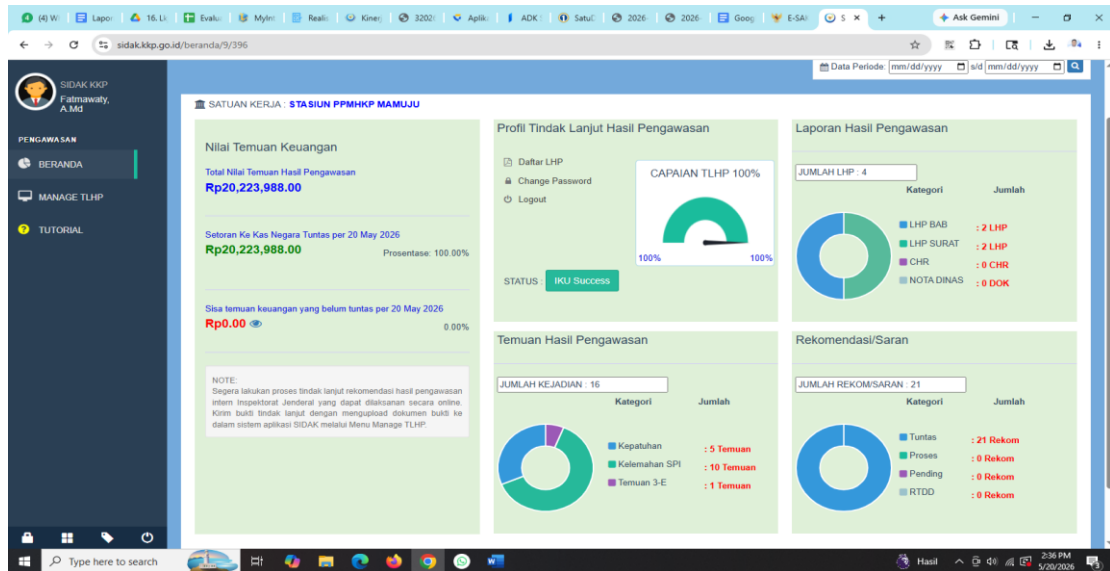
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2026			Renstra 2020-2026		
2025	Target 2026	Realisasi	%Capaian	Target 2025	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
85	86	100	116	85	86	116

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Monitoring Temuan atas laporan keuangan yang telah di jadikan temuan BPK atau itjen



IK. 10 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)

1. Capaian

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju pada Triwulan I tahun 2026 yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku memiliki target sebesar 77 dan Terealisasi sebesar 100. Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sejak tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktifitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadisangat Kegiatan dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan prosedur dan aturan yang berlaku.

Tabel 2.23. Target dan Realisasi IK.10 pada Tahun 2026

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju (%)						
Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2026			Renstra 2020-2026		
Realisasi	Target 2026	Realisasi	%Capaian	Target 2025	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
76	77	100	120	76	77	120

Pada tahun 2026 indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju memiliki target 77 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%) Capaian indikator ini pada Triwulan I Tahun 2026, dapat diperoleh.

IK .11 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Stasiun PPMHKP Mamuju

1. Analisis

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuesioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

2. Capaian

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Stasiun PPMHKP Mamuju (Indeks) yang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) melalui website <https://ptsp.kkp.go.id/skm> yang dilakukan setiap triwulan I dan pada Tahun 2026 mendapat perolehan nilai indeks 3.71 dengan target nilai indeks 3.50.

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun PPMHKP Mamuju (nilai) merupakan indikator utama Stasiun PPMHKP Mamuju dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh Mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survey yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun PPMHKP Mamuju.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Realisasi indikator ini 92,74 (indeks 3.71) dari target 88 (indeks 3,50) atau mencapai 106,%, Realisasi Nilai Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di UPT Stasiun PPMHKP Mamuju seperti disajikan dalam tabel di bawah ini :

Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Mamuju						
Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2026			Renstra 2024-2029		
2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	Target 2025	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
3.36	3.50	3.71	106	3.36	3.50	106

REALISASI ANGGARAN

Tabel Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

NO	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp.3.033.612.000	Rp.619.427.319	20.42
2	Pengendalian Mutu	Rp.44.717.000	0	0
3	Manajemen Mutu	Rp.80.000.00	0	0
	Total	Rp.3.158.329.000	Rp.619.427.319	20.42

Tabel. Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja

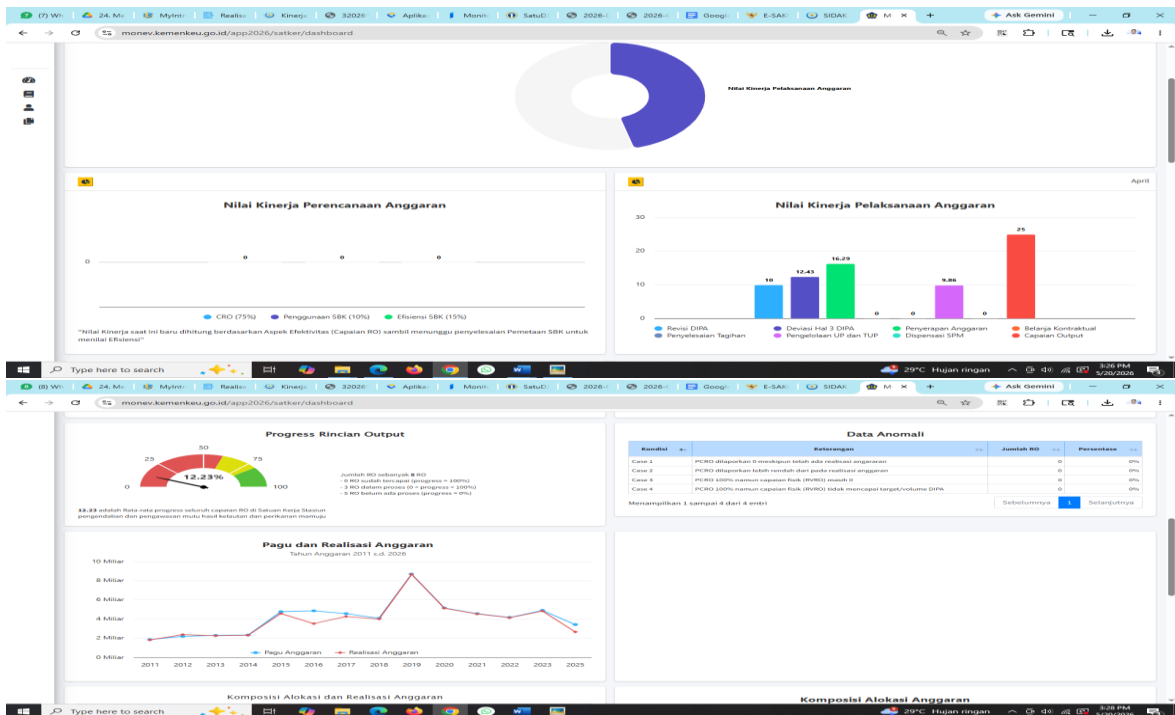
NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp.2.255.961.000	Rp.821.577.626	36.42
2	Belanja Barang	Rp.902.368.000	Rp.242.966.236	26.93

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hail Perikanan Mamuju telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, prasarana dan sarana serta SDM yang tersedia. Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK No.22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai efisiensi anggaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hail Perikanan Mamuju sampai dengan Tahun 2025 sebesar **31.1** berdasarkan pada aplikasi SMART. Efisiensi sesuai hasil pada <https://monev.kemenkeu.go.id/App2026/satker>



BABI V PENUTUP

Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Mamuju TW I Tahun 2026 merupakan instrument bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan Kegiatan dapat dicapai dan terwujud melalui implementasi strategi pencapaiannya yaitu program dan kegiatan yang bersinergi. Program dan kegiatan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2026.

Tingkat capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Mamuju secara keseluruhan berhasil dengan baik atau kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target tujuan dan laporan yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan secara internal.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 11 indikator kinerja utama, Stasiun PPMHKP Mamuju tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk menyatukan persepsi agar target indikator kinerja lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program

REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja SPPMHKP Mamuju triwulan I tahun 2026 Sebagai bentuk peningkatan Perbaikan Kinerja pada triwulan berikutnya maka perlu diadakan Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan

untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Triwulan mendatang diantaranya

1. perlu adanya sosialisasi terhadap pelaku usaha, penyuluh perikanan, dinas perikanan kabupaten/kota, terkait aplikasi OSS
2. perlu adanya pelatihan untuk pembina mutu di daerah
3. Dibutuhkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi ke pelaku usaha
4. Melakukan Komunikasi dengan Dinas KP Prop./ Kab./Kota dalam rangka percepatan pembinaan dan upaya sertifikasi bagi pelaku usaha/Unit Pengolah Ikan dan Suplier
5. Sosialisasi tentang Layanan Sertifikasi bagi Pelaku usaha perikanan melalui Media Sosial dan secara langsung daerah
6. Koordinasi dengan Penyuluh perikanan dalam upaya pendampingan bagi pelaku usaha perikanan dalam memperoleh NIB dan Administrasi lainnya di daerah.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU

Jalan Martadinata Simpang Empat Arteri Simboro, Mamuju 91512

TELEPON (0426) 22434 LAMAN www.kkp.go.id Email sppmhkp.mamuju@kkp.go.id



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN

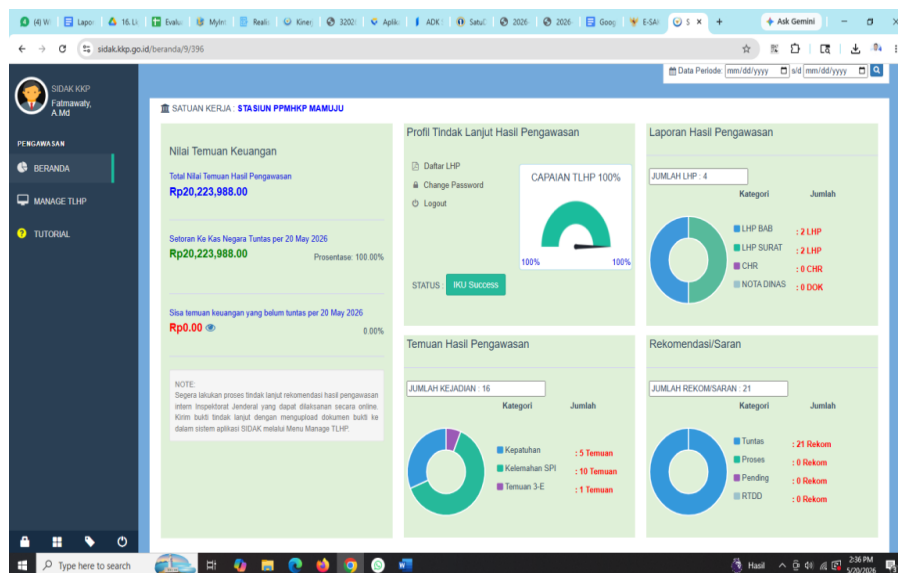


LAPORAN KINERJA

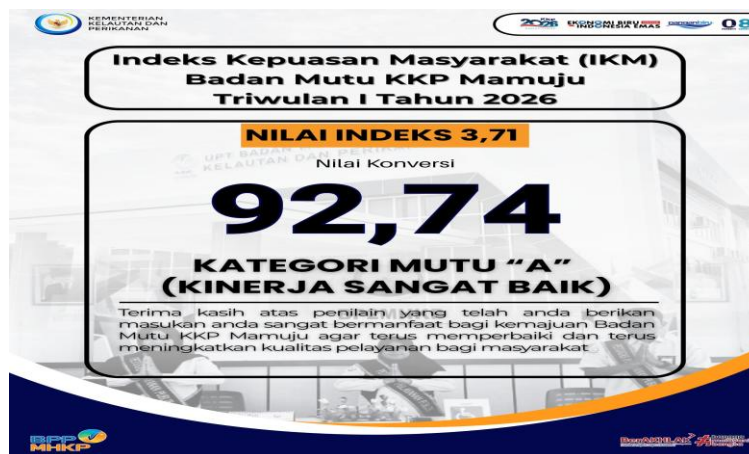
TRIWULAN I TAHUN 2026



Rekomendasi pengawasan



Indeks Kepuasan Masyarakat





LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026

